

## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

- Army, H. Eddy. 2020. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Chandra M. Hamzah. 2014. *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Chazawi, Adami dan Adi Ferdian. 2011. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik)*. Malang: Media Nusa Creative.
- Chazawi, Adami. 2016. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang: Media Nusa Creative.
- Chazawi, Adami. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana*. Malang: Raja Grafindo Persada.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Effendi, Tolib. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Fuady, Munir. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Siregar, Gomgom T.P, 2020. *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*. Medan: Refika Aditama.
- H, Ishaq. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F, 2013. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

- Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni Bandung.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2010. *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum UNDIP. Semester Ganjil 2009-2010.
- Praseto, Teguh. 2017. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali.
- Remaja, I. Nym. Gd. 2020. *Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*. Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
- Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sabian, Utsman. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif: Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw (Tinjauan Aspek Hukum Pidana)*. Jakarta: Tatanusa.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Asis Abd. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. dan Mamudji, Sri. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet.16*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 2018. *Hukum Pidana I Edisi Kelima*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunarsono, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2012. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tebba, Sudirman. 2016. *Hukum Media Massa Nasional*. Ciputat: Pustaka Irvan.

Zaenudin, A. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 08 Januari 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tentang Tata Cara Penanganan Pertama Bukti Elektronik. Penangan Pertama Bukti Elektronik (*Digital Evidence First Responder – DEFR*).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021.

## **ARTIKEL/JURNAL**

Brisilia Tumulun, Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, *Journal: Lex Et Societat, Vol. VI/No. 2/April/2018*.

Hamdi, Syaibatul, dan Mujibussalim Suhaimi. 2013. Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum* 1.4.

Harizona, D. 2018. Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti di Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam. *Jurnal Intelektualita Keislaman, Sosial dan Sains, Vol.7. No. 1*.

- Hartono, Made Sugi dan Ni Putu Rai Yuliastini. 2020. Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 6 No 1*, 281-302.
- I Putu Krisna Adhi, 2018. Rekaman Elektronik Personal Chat Pada Sosial Media Sebagai Alat Bukti, *Vol. 1 No. 3 Media Iuris*.
- Kurniawan, Daniel Widya, 2018. Kekuatan Pembuktian Cetak Media Sosial Dalam Menyebarkan Konten Pornografi Sebagai Tindak Pidana Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Verstek 8.1*.
- Lumbanraja, Rumia R.A.C. 2016. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penghinaan Melalui Layanan Pesan Singkat atau SMS (Short Message Service). *Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan*.
- Mulyono, Galih Puji. 2017. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Bidang Teknologi Informasi, *Jurnal Vol.8, No.2, 2017, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang*.
- Permana, I. Putu Angga, I. Made Arjaya, and Ni Made Sukaryati Karma, 2021. Peranan Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Jurnal Interpretasi Hukum 2.2 (2021): 422-428*.
- Saputri, Ade Ayu. 2021. Parameter Pendeteksian Image Forensics Terkait Manipulasi Foto Dalam Tindak Pidana Cyber Harrasment. *Jurnal Hukum Bangkadesia 1.1 (2021): 16-31*.
- Sepima, Andi, Gomgom TP Siregar, and Syawal Amry Siregar, 2021. Penegakan Hukum Ujaran Kebencian Di Republik Indonesia. *Jurnal Retentum 2.1: 2021: 108-116*.
- Yusuf. 2013. "Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Untuk Kasus Korupsi Kajian Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Jurnal Episteme, Volume 8, Nomor 1, Juni 2013*.
- Zainal, Asrianto. 2016. Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana, *Jurnal Al- 'Adl, Vol. 9 No. 1, Januari 2016*.

## **INTERNET**

*Institute Criminal Justice Reform, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, ICJR Dorong Pemerintah Atur Ulang Kedudukan Bukti Elektronik*, melalui <https://icjr.or.id/pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-icjr-dorong-pemerintah-atur-ulang-kedudukan-bukti-elektronik/> , diakses Selasa, 12 Oktober 2021, Pukul 21:37 Wita.

"Ditahan Atas Kasus Pencemaran Nama Baik, Kades Desa Tamblang Laporan Balik", melalui <https://www.patrolipost.com/55700/ditahan-atas-kasus->

[pencemaran-nama-baik-kades-desa-tamblang-lapor-balik/](#) diakses Selasa, 12 Oktober 2021, Pukul 21.56 Wita.

“Marak Penyitaan Akun Media Sosial, Bagaimana Ketentuannya?”, melalui [https://kliklegal.com/marak-penyitaan-akun-media-sosial-bagaimana-ketentuannya/](#) diakses Rabu, 13 Oktober 2021, Pukul 09.34 Wita.

“Kasus dr. Richard Lee vs Kartika Putri: Akses Ilegal terhadap Barang Bukti Digital?”, melalui [https://heylawedu.id/blog/kasus-dr-richard-lee-vs-kartika-putri-akses-ilegal-terhadap-barang-bukti-digital](#) diakses Rabu 13 Oktober 2021, Pukul 10.09 Wita.

“Sat Reskrim Polres Buleleng Berhasil Mengungkap Kasus Pencemaran Nama Baik di Medsos”, melalui [https://www.polresbuleleng.com/blog/2019/02/20/sat-reskrim-polres-buleleng-berhasil-mengungkap-kasus-pencemaran-nama-baik-di-medsos/](#) diakses Selasa, 13 Oktober 2021, Pukul 20.14 Wita.

